
Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia dari KTSP hingga Kurikulum Merdeka

Uli Arta Agape Sihombing¹⁾, Arga Cristin Sinaga²⁾, Juli Wulan Dari Br Keliat³⁾, Hartalina Oktavia Simanjuntak⁴⁾, Valentina Rose Sidabutar⁵⁾, David Gomgomtua Simamora⁶⁾, Yustinus Gulo⁷⁾, Herlina Jasa Putri Harahap⁸⁾

1,2,3,4,5,6,7,8.) Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan

Email : uliartaagapesihombing28@gmail.com
argacristinsinaga@gmail.com
hartalinasimanjuntak26@gmail.com
juliwulandari08@gmail.com
rosevalentina349@gmail.com
davidsimamora0826@gmail.com
yustinusgulo443@gmail.com
herlinajasaputriharahap76@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak diluncurkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Ini diikuti oleh Kurikulum K13 pada tahun 2013, dan yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2022. Setiap versi kurikulum ini memiliki pendekatan pedagogis yang berbeda, mulai dari peningkatan otonomi institusi pendidikan dan pengembangan karakter dengan pendekatan berbasis ilmiah, hingga metode pengajaran yang lebih fleksibel yang sesuai dengan profil siswa Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif mengenai perkembangan ketiga kurikulum tersebut dalam aspek struktur, kompetensi, penilaian, dan fleksibilitas guna menemukan perubahan mendasar dan tantangan dalam implementasinya di setiap tahap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif serta deskriptif-analitis. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis dilakukan terhadap dokumen resmi dan sumber akademis yang berkaitan dengan pendidikan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun KTSP memperkuat otonomi daerah, hal ini juga menimbulkan disparitas dalam standar pendidikan antar lembaga. Kurikulum K13 menghadapi hambatan dalam penerapannya, terutama yang berkaitan dengan kompleksitas penilaian kinerja serta beban administratif yang berat bagi guru. Walaupun kurikulum independen memberikan lebih banyak fleksibilitas, pelaksanaannya masih terhalang oleh kurangnya infrastruktur dan kapasitas guru yang memadai di berbagai wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kelanjutan reformasi kurikulum, penguatan kapasitas guru perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, yang merupakan syarat penting untuk suksesnya implementasi.

Kata kunci: Perkembangan Kurikulum, KTSP, K13, Kurikulum Merdeka

Abstract

Curriculum development in Indonesian education has undergone significant transformation since the launch of the School-Based Curriculum (KTSP) in 2006. This was followed by the K13 Curriculum in 2013, and the most recent, the Merdeka Curriculum, introduced in 2022. Each version of this curriculum has a distinct pedagogical approach, ranging from increasing the autonomy of educational institutions and developing character with a scientific-based approach, to more flexible teaching methods aligned with the Pancasila-based student profile. This study aims to conduct a comparative analysis of the development of these three curricula in terms of structure, competency, assessment, and flexibility to identify fundamental changes and challenges in their implementation at each stage. The methods used in this study are qualitative and descriptive-analytical. To achieve these objectives, official documents and academic sources related to education were analyzed. The research findings indicate that while the KTSP strengthens regional autonomy, it also creates disparities in educational standards across institutions. The K13 Curriculum faces obstacles in its implementation, particularly related to the complexity of performance assessments and the heavy administrative burden on teachers. Although independent curricula offer greater flexibility, their implementation remains hampered by a lack of adequate infrastructure and teacher capacity in various regions. This study concludes that to ensure the sustainability of curriculum reform, systematic and continuous teacher capacity building is essential, a prerequisite for successful implementation.

Keywords: Curriculum development, KTSP, K13, Merdeka Curriculum

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan alat penting dalam sistem pendidikan nasional dan mencerminkan arah kebijakan pendidikan nasional untuk menyiapkan generasi berikutnya. Di Indonesia, kurikulum telah melalui banyak perubahan yang signifikan sejak kemerdekaan, masing-masing sebagai jawaban terhadap kemajuan sosial dan ekonomi serta permintaan keterampilan yang terus berubah. Dalam dua puluh tahun terakhir, tiga momen kunci telah mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan nasional: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang diluncurkan melalui Keputusan Menteri No. 22 dan 23 pada tahun 2006; Kurikulum 2013 (K13), yang diperkenalkan sebagai perkembangan dari KTSP dengan fokus pada pendekatan ilmiah dan penilaian hasil belajar yang autentik; dan Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan secara bertahap sejak tahun 2022, sebagai tanggapan terhadap tantangan pendidikan di abad ke-21 dan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran.

Perubahan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif; tetapi juga mencakup elemen filosofis, pedagogis, dan struktural yang sangat mendasar. KTSP memberi keleluasaan kepada institusi pendidikan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal mereka. Namun, dalam praktiknya, kurikulum ini terus menghadapi berbagai masalah terkait dengan ketidakcocokan kualifikasi dan kualitas guru di berbagai wilayah. Untuk mengatasi kendala ini, dengan menerapkan standar nasional yang lebih ketat, mengintegrasikan pengembangan karakter, dan menerapkan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran, dikembangkanlah Kurikulum 2013. Namun, kurikulum ini tidak lepas dari kritik, khususnya mengenai kompleksitas penilaian kinerja dan beban kerja guru yang dianggap terlalu berat. Berdasarkan hal ini, Kurikulum Merdeka diciptakan dengan mengadopsi pendekatan berbasis proyek, pembelajaran yang berfokus pada siswa, dan pencapaian kompetensi yang lebih fleksibel, yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam kurikulum sebelumnya. Rangkaian perubahan paradigma ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana masing-masing transformasi ini benar-benar membawa perubahan yang signifikan dalam praktik pendidikan di lapangan.

Beberapa penelitian telah dilaksanakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan penerapan kurikulum individu di Indonesia. Analisis perbandingan yang secara terstruktur menyelidiki proses perkembangan dari KTSP menuju Kurikulum 2013 dan kemudian Kurikulum Merdeka dengan mempertimbangkan aspek kebijakan, struktur kurikulum, metode pengajaran, dan pengaruhnya terhadap praktik pembelajaran masih sangat sedikit. Kekurangan penelitian ini sangat penting karena pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan analisis yang menyeluruh baik dari perspektif sejarah maupun perbandingan. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai kesinambungan dan perbedaan antara kurikulum-kurikulum tersebut, ada kemungkinan bahwa evaluasi kebijakan yang ada saat ini dan di masa depan akan kehilangan konteks yang krusial.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif dan kritis mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari KTSP hingga Kurikulum 2013 dan kemudian ke Kurikulum Merdeka. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeteksi perubahan utama dalam struktur dan arah kurikulum di setiap fase, mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi, serta mengevaluasi pengaruh perubahan tersebut terhadap praktik pembelajaran. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan menganalisis berbagai regulasi, dokumen kebijakan, serta literatur akademis yang relevan.

Temuan dari penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan perspektif teoretis dengan memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perkembangan kurikulum nasional dari KTSP ke Kurikulum Merdeka. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan memberikan pandangan praktis bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk pembuat kebijakan, kepala sekolah, dan guru agar bisa memahami motif yang mendasari setiap perubahan kurikulum

serta memaksimalkan penerapannya. Lebih jauh lagi, penelitian ini berperan dalam diskusi akademis mengenai reformasi pendidikan di negara-negara yang sedang berkembang, yang ditujukan untuk menyatukan standar internasional dengan pengetahuan lokal dalam proses pengembangan kurikulum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum di Indonesia secara komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari sumber utama, terutama peraturan dan pedoman resmi yang berkenaan dengan pelaksanaan KTSP, Kurikulum 2013, serta Kurikulum Merdeka. Selain itu, juga digunakan sumber sekunder seperti artikel jurnal akademik yang dapat diakses publik dalam bidang pendidikan.

Analisis data dijalankan dengan menggunakan analisis tematik berbasis konten yang melibatkan tiga langkah: pengkodean terbuka untuk menemukan tema dalam dokumen, pengkodean aksial untuk mengelompokkan hasil dari masing-masing kurikulum, dan pengkodean selektif untuk menyusun sintesis komparatif antar kurikulum. Pemilihan dokumen didasarkan pada kepentingan tematik yang berkaitan dengan struktur kurikulum, kompetensi, penilaian, serta fleksibilitas proses belajar. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber yang mencakup dokumen peraturan resmi dan literatur empiris, agar dapat memastikan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

KTSP merupakan langkah awal dalam desentralisasi pendidikan di Indonesia, memberikan wewenang kepada lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Awaludin dkk (2025) menjelaskan bahwa dasar dari pengembangan KTSP berfokus pada potensi, perkembangan, dan minat siswa serta komunitas mereka. Tujuan dari ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah serta mendukung pembelajaran yang berkelanjutan sepanjang hayat. Pendekatan ini mencerminkan perubahan cara pandang dari sistem yang sebelumnya terpusat ke yang memberikan ruang bagi keberagaman lokal dalam pendidikan.

Awaludin dkk. (2025) mengidentifikasi beberapa manfaat, yakni KTSP memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menyusun kurikulum dan materi ajar, serta memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Nisa (2023) menambahkan bahwa manfaat lain dari KTSP adalah peningkatan keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum, yang pada dasarnya menumbuhkan rasa tanggung jawab profesional terhadap proses pembelajaran. Namun, kebebasan ini juga mengantarkan pada masalah struktural yang serius dalam sistem pendidikan. Awaludin dkk. (2025) mencatat bahwa kualitas pelaksanaan KTSP sangat tergantung pada kemampuan masing-masing sekolah. Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan yang besar antara sekolah-sekolah yang lebih maju dan yang kurang berkembang, diperburuk oleh kurangnya pengawasan yang mengakibatkan ketidakserasian dalam pelaksanaan. Nisa (2023) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa ketiadaan standar dan pedoman yang jelas dalam pengembangan kurikulum memperbesar kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan di seluruh tanah air. Situasi ini pada akhirnya menjadi alasan utama dilaksanakannya reformasi kurikulum pada tahun 2013.

Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum 2013 diluncurkan sebagai sebuah reaksi langsung terhadap batasan-batasan yang ada pada KTSP. Tujuannya adalah menciptakan standar nasional yang lebih konsisten sambil memperkuat kemampuan siswa secara menyeluruh. Menurut Awaludin dkk. (2025),

kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis pada kompetensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21, dengan menekankan keseimbangan antara keterampilan lunak dan keterampilan keras. Kurikulum ini menggabungkan pengajaran mengenai aspek-aspek seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh Kurikulum 2013 juga terlihat pada pendekatan baru dalam mengembangkan kompetensi: mata pelajaran tidak lagi menjadi titik awal, tetapi berasal dari kompetensi yang telah ditentukan, dengan pembelajaran tematik dan integrasi yang berlangsung di seluruh mata pelajaran (Awaludin dkk., 2025). Wardani dan Khumairah (2025) juga menegaskan bahwa Kurikulum 2013 fokus pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan untuk abad ke-21, dan metode pembelajaran yang berfokus pada sains dan teknologi dengan menggunakan model tematik integratif yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa secara seimbang dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dari sisi pedagogis, Awaludin dkk. (2025) berpendapat bahwa pendekatan ilmiah serta penilaian yang autentik dalam Kurikulum 2013 mendorong pembelajaran yang lebih dinamis dan menempatkan pengembangan karakter dan literasi di posisi utama. Nisa (2023) menambahkan bahwa secara konseptual, Kurikulum 2013 mendukung pengembangan kompetensi secara holistik di antara siswa dan memperkuat pembentukan karakter dengan mengaitkan pembelajaran teoretis dan praktik secara langsung.

Namun, pelaksanaan Kurikulum 2013 dihadapkan pada berbagai tantangan yang mendasar. Awaludin dkk. (2025) menemukan bahwa guru mengalami kesulitan yang signifikan dalam melakukan penilaian yang kompleks dan menerapkan pembelajaran berbasis tema, sementara beban administrasi yang tinggi menghambat perhatian mereka pada proses belajar itu sendiri. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2023), yang menunjukkan perlunya penguatan kompetensi guru dan waktu adaptasi yang lebih panjang sebagai faktor krusial yang perlu dipertimbangkan saat mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Penelitian perbandingan juga menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 sering mendapat kritik karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya, yang menghalangi penerapan yang konsisten di seluruh Indonesia (Saputra & Stiawan, 2024). Kompleksitas ini mendorong pemerintah untuk merancang pendekatan kurikulum yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi.

Kurikulum Merdeka (2022-sekarang)

Kurikulum Merdeka lahir dari urgensi untuk memiliki sistem pendidikan yang dapat beradaptasi dengan tantangan pembelajaran setelah COVID-19 sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi dinamika dunia yang terus berubah. Awaludin dkk (2025) menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka memperkenalkan pembelajaran yang bervariasi, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan unik setiap siswa, dengan disertai Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila (P5) sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi secara menyeluruh, serta memberikan kebebasan kepada para guru untuk menyusun materi pelajaran secara mandiri. Nisa (2023) menambahkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, karena memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing. Wardani dan Khumairah (2025) menambahkan bahwa prinsip Merdeka Belajar memberikan hak kepada pendidik dan siswa untuk memilih cara belajar yang paling tepat dengan kemampuan dan kebutuhan individu, dengan fokus utama pada pembelajaran yang berbasis proyek sebagai dasar pembentukan karakter.

Dalam peraturan, dukungan pemerintah untuk Kurikulum Merdeka terlihat jelas melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, yang mewajibkan semua lembaga pendidikan untuk beralih ke Kurikulum Merdeka paling lambat pada tahun ajaran 2026/2027, dengan memberikan keringanan untuk daerah yang kurang beruntung, terpencil, dan terluar. Peraturan ini menandai fase baru dalam penguatan kebijakan kurikulum nasional, di mana Kurikulum Merdeka tidak lagi bersifat opsional tetapi menjadi kerangka tersendiri yang mengikat semua jenjang pendidikan di Indonesia. Meskipun

penerapannya telah meluas secara signifikan pada tahun ajaran 2024/2025, masih ada lembaga pendidikan di daerah terasing yang menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses informasi dan infrastruktur yang tidak memadai dalam mendukung penerapan kurikulum ini secara optimal.

Namun, Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya yang cukup rumit. Awaludin dkk. (2025) mengungkapkan bahwa diperlukan penyesuaian besar dari para guru dan institusi pendidikan, sementara sarana dan prasarana pendukung belum tersebar dengan baik di berbagai wilayah. Sebuah penelitian mengenai ketidakmerataan pendidikan yang berlandaskan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di daerah terpencil tidak mengalami perkembangan yang setara dengan yang ada di kota-kota besar, serta akses dan kemampuan pengajar di daerah tersebut masih sangat terbatas (Al-Ihda', 2025). Keadaan ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa wilayah terpencil belum dapat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan baik akibat keterbatasan akses internet serta rendahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran (Setneg, 2024).

Terkait penyesuaian guru, tantangan yang ada bersifat multiaspek. Penelitian mengenai dinamika adaptasi para pengajar mengidentifikasi tiga aspek penting tantangan: aspek kognitif-pedagogis, yang mencakup kesalahpahaman utama mengenai pembelajaran diferensiasi dan penilaian yang bersifat formatif; aspek struktural, yang ditandai oleh ketidakmerataan infrastruktur digital serta ketidakefektifan dalam model pelatihan guru yang bersifat pasif; serta aspek psikologis yang muncul sebagai dampak dari kelelahan administratif dan ketidakpastian dalam kebijakan yang ada (Sihite dkk., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga mencakup sisi psikologis dan struktural yang lebih mendasar.

Analisis Perbandingan: Perubahan Paradigma dan Faktor yang Mendorong Transformasi

Analisis perbandingan ketiga kurikulum ini menunjukkan adanya pola perubahan yang terus menerus namun bertentangan dalam pengembangan kurikulum nasional. Awaludin dkk. (2025) memperhatikan bahwa transformasi paradigma dalam kurikulum Indonesia berlangsung secara bertahap: beralih dari sentralisasi menuju desentralisasi yang semakin luas, dari pendekatan yang fokus pada isi menuju pendekatan yang menekankan pada kompetensi, serta dari kurikulum yang kaku menjadi kurikulum yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan konteks. Nisa (2023) menguatkan analisis ini dengan mencatat bahwa setiap kebijakan kurikulum menggambarkan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki sistem pendidikan, meskipun masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang perlu dianalisis secara mendalam.

Tabel 1. Perbandingan komparatif keempat dimensi utama antar kurikulum

Aspek	KTSP 2006	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka 2022
Struktur	Berbasis Kompetensi Dasar per mata pelajaran	Tematik integratif, berbasis KI-KD	Berbasis Capaian Pembelajaran (CP), fase
Kompetensi	Kognitif dominan	Sikap, pengetahuan, keterampilan seimbang	Kompetensi esensial + karakter Profil Pelajar Pancasila
Penilaian	Ujian Nasional & nilai kognitif	Penilaian autentik & holistik	Asesmen formatif & sumatif, refleksi pembelajaran
Fleksibilitas	Tinggi (otonomi sekolah)	Rendah (standarisasi ketat)	Sangat tinggi (otonomi guru & peserta didik)
Peran Guru	Perancang kurikulum	Pelaksana modul	Fasilitator & desainer pembelajaran

Tantangan Utama	Kesenjangan kualitas antardaerah	Beban administratif guru	Kesiapan SDM & infrastruktur
-----------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

Dari sudut pandang penggerak perubahan, setiap perubahan dalam kurikulum ditentukan oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Awaludin dkk. (2025) menyatakan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga oleh tuntutan untuk pendidikan yang lebih fleksibel, berorientasi pada siswa, dan relevan dengan tantangan global. Secara khusus, analisis perbandingan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih dapat disesuaikan, yang memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan potensi masing-masing siswa (Aisyah dkk., dalam sebuah tinjauan, 2024). Pendekatan ini secara langsung mengatasi kelemahan yang ada pada Kurikulum 2013, yang dianggap terlalu terpusat dan kurang kontekstual.

Tantangan yang paling sering muncul dan berulang di setiap tahap perubahan kurikulum adalah kesiapan para pendidik. Awaludin dkk. (2025) menegaskan bahwa walaupun setiap modifikasi kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan global, kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan pendekatan baru terus menjadi masalah struktural yang sering terjadi. Suryani dkk. (2025) menekankan bahwa meskipun para guru memiliki niat untuk beradaptasi dengan pembaruan kurikulum, kurangnya pelatihan yang tepat dan berkelanjutan menjadi kendala utama dalam menginternalisasi filosofi dan praktik kurikulum yang baru, ditambah lagi dengan meningkatnya beban kerja dan ketidaksetujuan awal terhadap perubahan tersebut.

Dampak terhadap Pelaksanaan Pembelajaran dan Kebijakan Pendidikan

Analisis tentang perkembangan ketiga kurikulum tersebut mengungkapkan beberapa implikasi signifikan yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Pertama, isu yang paling sering muncul dalam setiap fase perubahan kurikulum adalah kesiapan para pengajar. Awaludin dkk. (2025) menyatakan bahwa meskipun setiap pergeseran kurikulum bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan tuntutan global, kesiapan guru untuk memahami dan menerapkan metode baru tetap menjadi kendala struktural yang terus berlanjut. Suryani dkk. (2025) menyarankan bahwa keberhasilan dalam penerapan kurikulum memerlukan pelatihan yang terus-menerus berdasarkan kebutuhan nyata para guru, penguatan komunitas belajar profesional, dan pengurangan tugas administrasi agar guru dapat lebih berkonsentrasi pada aktivitas utama pengajaran di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan reformasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari investasi yang terencana dalam pengembangan keterampilan guru, yang merupakan syarat utama untuk keberhasilan implementasi.

Kedua, permasalahan kesenjangan geografis dan fasilitas masih menjadi isu yang tidak terselesaikan di berbagai kurikulum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024) mengingatkan bahwa masalah kesenjangan pendidikan perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor, mengingat bahwa isu infrastruktur di daerah terpencil membutuhkan intervensi dari berbagai bidang di luar pendidikan. Jika masalah infrastruktur ini tidak diatasi, potensi Kurikulum Independen sebagai kurikulum yang adaptif berbasis teknologi tidak akan terdistribusi dengan baik di seluruh Indonesia.

Ketiga, pola perubahan desentralisasi-sentralisasi-desentralisasi dalam pengembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi pun yang mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikan nasional secara bersamaan. Setiap kurikulum berusaha menyelesaikan kekurangan dari pendahulunya, namun juga menciptakan tantangan baru yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan—bukan sekadar perubahan kurikulum—adalah faktor utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan cara yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia, dari KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka, merupakan langkah yang adaptif terhadap tuntutan global, tetapi tetap dihadapkan pada tantangan mendasar. Setiap revisi kurikulum membawa perubahan cara pandang, mulai dari desentralisasi dalam KTSP hingga pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan penekanan pada karakter Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Namun, hambatan klasik seperti beban administratif yang tinggi untuk guru, perbedaan infrastruktur antara wilayah, dan kesiapan keterampilan tenaga pendidik masih menjadi penghalang utama dalam penerapannya. Maka dari itu, keberhasilan kurikulum di masa depan tidak hanya bergantung pada pengembangan dokumen kebijakan baru, tetapi juga memerlukan investasi yang berkelanjutan untuk pelatihan profesional guru yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta pemerataan infrastruktur pendidikan secara nasional agar semua siswa dapat mengakses secara adil.

REFERENSI

- Aisyah, S., Arisanti, K., & Yaqin, F. A. (2023). Adaptasi dan inovasi madrasah ibtidaiyah dalam menyambut Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 386–393. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4583>
- Alimuddin. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Kontekstual*, 4(1). <https://jurnal.umus.ac.id/index.php/kontekstual/article/view/995>
- Awaludin, A., Febriyanti, F., Trisiani, T., Astrid, S. C. A., Erlinawati, E., Baroroh, U., Karima, I., & Egar, N. (2025). Telaah kurikulum sekolah tahun 2006 hingga Kurikulum Merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 679–687. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5995>
- Fitriani, Y., & Azizah, N. (2024). Problematika guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Obsesi*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i1>
- Handayani, S., Salamah, & Idawati. (2024). Analisis implementasi profil pelajar Pancasila pada teks berita di SMP IT Insan Taqwa Lampung. *Syntax Idea*, 6(5). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3382>
- Hidayat, T., & Suryana, D. (2023). Peran guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 8(2). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jp>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 251/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Marzuqi, B. M., & Ahid, N. (2024). Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia: Prinsip dan implementasi. *Jurnal Faktor Biyah*, 5(1), 78–92. <https://jurnalfaktarbiyah.iainkediri.ac.id/index.php/joiem/article/view/1284>
- Mardiana, D., & Emmiyati. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/PD/article/view/30152>
- Nisa, K. (2023). Analisis kritis kebijakan kurikulum: Antara KBK, KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 118–126. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alrosikhun>
- OECD. (2022). PISA 2022 results: Indonesia. <https://www.oecd.org/pisa/>
- Pratami, W., Charolina, A. D., Nirwana, E. S., Maharani, W. I., Heriyani, R., & Dewi, R. M. (2024). Tantangan dan strategi implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar: Studi literatur kualitatif. *Jurnal Basicedu*, 9(6). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10806>
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>

- Saputra, A. A., & Stiawan, A. (2024). Kajian review kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka dalam implikasinya terhadap pembelajaran. *SOSEARCH: Social Science Educational Research*, 5(1), 1–17. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/sosearch>
- Sianipar, W. M., Putri, S. A., Ambarani, V. V., Harianja, I., & Utami, W. S. (2025). Analisis kesenjangan pendidikan berbasis Kurikulum Merdeka. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*. <https://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs/article/view/296>
- Suryani, Y., Haeruddin, & Akhmad. (2025). Analisis dampak pembaharuan kurikulum nasional terhadap kualitas pembelajaran. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(3), 7222–7228. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- UNESCO. (2023). Education in Indonesia: Curriculum reform post-COVID. <https://unesdoc.unesco.org/>
- Wardani, D. K., & Khumairah, S. D. (2025). Analisis perbandingan penerapan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4658–4665. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Zahra, S. (2025). Evolusi kurikulum nasional Indonesia dari KTSP hingga Kurikulum Merdeka. *Scribd*. <https://id.scribd.com/document/866720611/artikel-Zahra-Soraya-24002158-1-1>